



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar,  
Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Pos-el : dlhk@kepriprov.go.id Laman : <http://dlhk.kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 7 Juli 2025

Nomor : B/000.8.3.4/695/DLHK-01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Pengiriman Data DIP dan DIK

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kepulauan Riau  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 4 Juni 2025 Nomor B/000.8.3.4/113/DKI/2025 hal Permintaan DIP dan DIK, berkaitan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan Data DIP dan DIK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197105012003121008

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	INFORMASI			
							WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1	SK Indikator Kinerja Utama DLHK 2022 NOMOR : 855/KPTS-14/II/2022	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√			
2	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri	Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun			√	
3	Gambaran Umum Satuan Kerja	Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√		√	
4	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√		√	
5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021	Sekretaris	Sub Bagian Keuangan		Hardcopy/ Softcopy	1 Tahun	√			
6	PK Eselon II	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	1 Tahun	√			
7	Perjanjian Kinerja Es. III Tahun 2022	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	1 Tahun	√			

8	Visi dan Misi 2021 - 2026	Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Setiap Lima Tahun	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√		√	
9	Kedudukan domisili dan alamat lengkap Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi kepulauan Riau	Sekretaris	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√			
10	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016 - 2021	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Tahun 2016	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√			
11	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 - 2026	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Lima Tahun	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	√			
12	Ranwal 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	√			
13	Renja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	√			
14	SOP Pengajuan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Keg Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi 2022	Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	√			
15	SOP Pengajuan Kegiatan Pengawasan terhadap perusahaan dalam Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi 2022	Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	√			
16	SOP Pengajuan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 2022	Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	√			
17	Mekanisme permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) pada hutan	Kepala Bidang Koordinasi Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan	Bidang Koordinasi Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	Selama tidak ada perubahan	√			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara

	lindung / produksi	Hutan									
18	Mekanisme/Proses permohonan persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK)	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	5 Tahun	✓				
19	Mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Menteri	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	Selama tidak ada perubahan	✓				
20	SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 2022	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				
21	SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Hutan pada Hutan Lindung 2022	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				
22	SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Hutan pada Hutan Produksi 2022	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				
23	SOP Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) 2022	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				
24	SOP Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 2022	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				
25	Proses Bisnis Pemberian PBPHP Skala usaha kecil Berupa NIB	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				
26	Permohonan Pelepasan kawasan Hutan kepada Menteri (Untuk Non Komersial)	Kepala Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Bidang Koordinasi Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

27	Skema Perhutanan Sosial	Kepala Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓			
28	SOP Pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kepala Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓			
29	SOP Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 2022	Kepala Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓			
30	SOP Penyusunan data dan Informasi RHL 2022	Kepala Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sub Bidang Konservasi	Setiap Tahun	Hardcopy/ Softcopy	12 Bulan	✓			

Tanjungpinang, 7 Juli 2025  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP 197105012003121008

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKWENSI		BATAS WAKTU PENGUACUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	Peta PIAPS dalam bentuk SHP (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62	Jika tersebar luas pada publik, dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Menghindari terjadinya misinformasi pada publik; mengamankan pengelolaan program perhutanan sosial	tidak terbatas
2	Peta Sebaran Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk SHP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62	Jika tersebar luas pada publik, dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Menghindari terjadinya misinformasi pada publik; mengamankan pengelolaan program perhutanan sosial	tidak terbatas
3	Informasi orang yang mempergunakan hak atas lingkungan hidup (pelapor)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66	Terjadinya tindakan pembalasan dan terlapor melalui pemidanaan/gugatan perdata	Melindungi Korban / Pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran perusakan Lingkungan hidup	Tidak Terbatas
4	Saksi, pelapor dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar	Pasal 76 uu 18 tahun 2013 ttg pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	Terjadinya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta, termasuk keluarganya	menghindari terjadinya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta, termasuk keluarganya	a. pelapor dan informan meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam permohonan diajukan atas inisiatif sendirib. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap pelapor dan informan berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan.c.pelapor dan informan melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian.instansi yang berwenang berpendapat bahwa pelapor dan informan tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; atau.e.penghentian perlindungan keamanan seorang pelapor dan informan harus dilakukan secara tertulis

5	Peta dalam Luasan DAS & Rehabilitasi Hutan dan Lahan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j. UU No. 4 Tahun 2011 tentang informasi GEO Pasial Pasal 62	Jika tersebar luas pada publik dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Menghindari terjadinya Mis-informasi pada publik, mengamankan pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tidak Terbatas
6	Peta dalam persetujuan penetapan RHL		Jika tersebar luas pada publik dikhawatirkan akan terjadi konflik dengan publik	Menghindari terjadinya Mis-informasi pada publik mengamankan program pengelolaan program DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tidak Terbatas

Tanjungpinang, 7 Juli 2025  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 Provinsi Kepulauan Riau,



Hendri, S.T.  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP 197105012003121008